

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan terkait Peran Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Sampah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, peneliti juga akan memberikan beberapa saran ataupun masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Saran ataupun masukan tersebut tentunya didasari dari temuan fakta dilapangan pada saat penelitian berlangsung baik pada saat observasi maupun pada saat melakukan wawancara, semoga saran yang diberikan oleh peneliti dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman agar Pengelolaan Sampah kedepannya menjadi lebih baik.

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2012

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Bahwasanya Peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah pada tahun 2012, sudah bekerja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pengelolaan yang dilakukan, dimana pemerintah tidak hanya bekerja sesuai dengan tugas pokoknya akan tetapi Pemerintah memberikan trobosan baru yang bisa memandirikan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membuat kelompok pengelolaan sampah memberikan

sosialisasi, pembinaan dan pendampingan tentang pengelolaan sampah. Agar masyarakat tertarik pemerintah memberikan dukungan dengan cara memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut dengan peralatan yang mendukung pengelolaan sampah.

Penambahan fasilitas dan sistem penanganan sampah yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Ditahun 2012 pemerintah melakukan penambahan fasilitas seperti satu buah armada pengangkut, satu buah transfer depo, dua buah tempat pembuangan sementara, terlaksananya pelayanan sampah perumahan dan niaga sebanyak 245 pelanggan, terbinanya LDUS di dua lokasi, terbangunnya brak kompos dan terangkutnya sampah sebanyak 325 m³/hari. Dengan demikian dapat dikatakan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah baik.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah terdiri dari faktor positif dan negatif sebagai berikut :

1. Faktor Positif

- a. Masih adanya masyarakat yang peduli untuk mengelola sampahnya sendiri. Hal ini tentunya sangat membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah.

- b. Partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri terus meningkat sehingga jumlah kelompok pengelola sampah mandiri terus bertambah.
- c. Tingkat kedisiplinan dan kejujuran petugas juga dapat mempengaruhi peran pemerintah, ketika petugas tingkat disiplinnya bagus maka hal tersebut dapat merubah persepsi masyarakat untuk menggunakan jasa layanan. Sehingga jumlah layanan bertambah, ketika jumlah layanan bertambah maka jumlah sampah liar akan berkurang. Hal ini dapat terlihat dari jumlah layanan yang diberikan pemerintah dari 186 menjadi 245

2. Faktor Negatif

- a. Kurangnya pekerja dan sarana prasarana menyebabkan pengelolaan sampah tidak berjalan maksimal sehingga terjadi penumpukan sampah.
- b. Keterbatasan informasi yang didapat oleh masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah menjadi berkurang.
- c. Ketidakejujuran masyarakat yang menjadi penyedia jasa, dengan membuang sampah – sampah yang mereka angkut ke kali, atau

B. Saran

1. Pemerintah sleman hendaknya merespon kekurangan – kekurangan yang ada dilapangan baik itu tenaga kerja, maupun fasilitas pengelolaan sampah. Sehingga sampah yang tertangani dapat lebih banyak.
2. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menangani sampah liar yang ada, ketika pemerintah tidak bisa mengangkut dan masyarakat tidak bisa diberikan pengertian. Pemerintah harus mencarikan solusi baru agar masyarakat tertarik untuk tidak membuang sampah disembarang tempat.
3. Pemerintah harus lebih teliti dalam mengawasi pihak penyedia jasa yang tidak jujur dalam memberikan data sampah dan langganan. Bahkan pemerintah dapat memberikan sanksi kepada penyedia jasa untuk mencabut izin operasinya.
4. Pemerintah harus bisa memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat yang memiliki niat untuk mengelola sampah dengan cara yang benar. Jdi informasi tidak hanya bisa didapat dari pemerintah.